

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

Akhir-akhir ini banyak media mempublikasikan masalah kesenjangan pri-nonpri, soal etnisitas dan mempromosikan berbagai bentuk layanan masyarakat yang menayangkan interaksi yang manis antara keduanya. Jika dulu ada film “ Si Unyil “ yang memunculkan Mei Lan dan Bun-Bun yang bahkan kini telah disiarkan lagi oleh sebuah stasiun TV swasta, lalu ada pula Sitorus, Joko dan Acong yang mengajak kita untuk hidup berdampingan secara damai. Pertanyaan yang muncul adalah apakah sudah sedemikian membahayakannya kesenjangan tersebut.

Harus kita akui bahwa masyarakat Indonesia memang masyarakat yang majemuk yang terdiri dari beraneka ragam etnis, bahasa, agama, adat istiadat dan mungkin masih ada pula segudang keanekaragaman yang lain. Keanekaragaman ini patut disyukuri sebagai kekayaan budaya yang tak ternilai, tetapi sekaligus juga patut diwaspadai karena dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam keanekaragaman itu menjadikan sebuah tantangan tersendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengikutinya. Salah satu yang paling menonjol dan berdampak luas adalah permasalahan yang berbau etnis yang menimbulkan banyak konflik rasial seperti yang seringkali terjadi.

Koentjaraningrat menjelaskan di bumi pertiwi ini ada sekitar tiga ratus kelompok etnis yang berbeda (Sukoco,1998,h.1). Etnis-etnis tersebut dapat dibedakan menjadi etnis pribumi dan etnis non pribumi. Etnis-etnis pribumi artinya

adalah etnis yang nenek moyangnya merupakan penduduk asli Indonesia seperti etnis Jawa, Sunda, Batak, Bali, dsb., sedangkan etnis-etnis non pribumi adalah etnis yang merupakan keturunan asing atau nenek moyangnya berasal dari bangsa lain atau pendatang, seperti Arab, Cina, Belanda, India, dsb.. Namun anehnya di antara kesemua etnis asing tadi yang paling unik dan memunculkan berbagai polemik yang tak terselesaikan adalah hubungan antara etnis pribumi dan etnis Cina, padahal kedua etnis itu sama-sama ras Mongol yang ciri biologisnya antara lain bercak Mongol, yaitu bercak biru pada pantat bayi Cina dan banyak bayi Nusantara lainnya (Murbando dalam Hamzah, 1998, h.35).

Banyak sekali fakta yang bisa kita temukan sehubungan dengan merebaknya berbagai pertikaian dan kerusuhan antara keduanya. Terkadang muncul pula kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia yang mengorbankan etnis Cina meski permasalahan pemicu utama munculnya perseteruan bukanlah etnis Cina atau bisa juga melibatkan etnis yang satu ini namun permasalahannya sangatlah sepele. Masalah rasialisme ini ternyata cukup serius, terbukti dengan adanya berbagai kerusuhan yang tidak hanya terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tetapi juga setelah bangsa ini merdeka. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain (Hariyono, 1993, h.13) : kegiatan anti Cina yang terjadi pada masa sekitar pendirian Sarekat Dagang Islam tahun 1911, sebagai akibat dari munculnya gerakan di antara golongan pribumi untuk menandingi penguasaan ekonomi oleh orang-orang Cina di Indonesia ; kegiatan anti Cina pada masa revolusi, sebagai akibat kesan di antara golongan pribumi bahwa seolah-olah golongan non pribumi Cina telah ikut membantu penjajah Belanda ; peristiwa 10 Mei 1963 di Jawa Barat, yang merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi di beberapa kota, dimulai dari kota

Cirebon, menjalar ke kota-kota lain di Jawa Barat, Jawa Timur dan berakhir di Yogyakarta pada tanggal 21-22 Mei 1963 ; peristiwa kerusuhan rasial 5 Agustus 1973 di Bandung ; peristiwa November 1980 di Solo, Semarang dan sekitarnya, yang bermula di Solo dan seminggu kemudian sudah menjalar ke kota-kota di Jawa Timur ; peristiwa di Tanjung Priok pada tahun 1984 ; peristiwa di Surabaya yang dimulai pada tanggal 16 September 1986, yang nyaris dikhawatirkan menjadi “*eksplosif*” ; peristiwa Pekalongan pada akhir tahun 1989. Kerusuhan-kerusuhan rasial ini juga seringkali meluas menjadi kerusuhan yang bertema agama. Sekitar tahun 1996-1997 terjadi peristiwa yang mengorbankan berpuluh-puluh tempat ibadah dan pertokoan di Situbondo, selanjutnya menjalar hampir di seluruh Jawa Timur, Tasikmalaya, Rengasdengklok dan beberapa kota lainnya (FKKSI, 1997, h.39-53). Puncaknya pada pertengahan Mei 1998 terjadi peristiwa yang mencoreng-moreng wajah bangsa ini di blantika internasional dengan tindakan-tindakan pembakaran yang menimbulkan kerugian harta benda di mana-mana, pembunuhan serta pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap berpuluh-puluh wanita etnis Cina di Jakarta yang juga terjadi di Solo dan beberapa kota besar di Indonesia (Yatim dalam Hamzah, 1998, h.15).

Hubungan antara orang-orang pribumi dan etnis Cina di Indonesia memang sesuatu yang unik, terutama hubungan antara etnis Cina dan etnis pribumi di Jawa, yang merupakan etnis mayoritas di bumi Indonesia ini..Banyak kerusuhan yang seringkali terjadi di kota-kota di Jawaseperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Hubungan antara kedua etnis ini sangat menarik banyak pihak.

Banyak kalangan yang telah membahas permasalahan antara kedua etnis ini namun semakin lama diulas, diseminarkan, semakin bertambah rumit pula

permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga masalah ini menjadi selalu aktual dan harus diperhatikan terus-menerus untuk memperoleh solusi yang paling efektif. Masalah etnis Jawa dan Cina berbeda dengan masalah etnis Jawa dengan etnis-etnis nonpri lainnya, misalnya Arab atau Belanda. Hal tersebut dimungkinkan karena etnis Cina menduduki peringkat pertama dalam hal kuantitas di bumi pertiwi ini. Selain itu etnis Arab dan Belanda tidak memainkan peran penting dalam panggung politik internasional-global mondial (Abdulgani dalam Sa'dun, 1999, h. 145). Meskipun ada pula beberapa sebab-sebab warisan masa lampau yang akhirnya terbawa sampai kini.

Banyak faktor yang menyebabkan etnis Cina dan Jawa masih sulit sekali disatukan antara lain seperti uraian-uraian di bawah ini.

Faktor *pertama*, politik *divide et impera* yang dimainkan oleh pemerintah Hindia Belanda di mana Belanda membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan (Jahja, 1995, h.7) : golongan paling atas adalah bangsa Eropa ; golongan tengah adalah bangsa Timur Asing seperti Arab, Cina, India, dsb. ; golongan paling bawah yaitu kaum “ *inlanders* “, bumiputra atau pribumi.

Para *inlanders* ini ditaruh paling bawah secara ekonomi, sosial dan dalam segi apapun. Kepandaian berdagangnya juga dicabut sampai ke akar-akarnya. Hanya keturunan Cina yang diperbolehkan berdagang. Jadi ada semacam kesenjangan, keturunan Cina yang menjadi *bumper* (sekat), dihalang-halangi oleh Belanda jangan sampai berdampingan dengan bumiputra (Jahja, 1999, h. 50). Hampir di setiap kota besar di Indonesia terdapat daerah yang disebut “ *pecinan* “ yang dulunya memang digunakan sebagai tempat bermukimnya etnis Cina ketika mereka tiba di Indonesia. Kampung-kampung “*pecinan*” itu berdiri di semua bandar

di mana terdapat pelabuhan dagang (Maulani dalam Sa'dun, 1999, h.58). Namun selanjutnya Belanda memanfaatkan hal itu, semakin mendukung keberadaan orang-orang Cina di daerah pecinan-pecinan sehingga orang Cina menjadi terisolasi, terkotak-kotak dan tidak membaaur sehingga tidak bekerjasama dengan orang-orang pribumi untuk melawan Belanda.

Faktor yang *kedua* adalah usaha kudeta PKI tahun 1965 yang membawa dampak politis dan sosial serta ekonomi bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kudeta tersebut, Cina diduga terlibat membantu kudeta sehingga masyarakat sendiri menjadi terpengaruh dan interaksi di antara keduanya menjadi renggang dan puncaknya adalah pemutusan hubungan diplomatik antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintah Cina (Sampurno, 1995, h. 15-23).

Faktor penyebab yang *ketiga* adalah perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah ORBA. Orang-orang Cina sepertinya dibatasi dan tidak diberi kesempatan untuk berkarya di bidang lain selain dalam sektor ekonomi sehingga akhirnya sebagian besar masyarakat etnis Cina berhasil dalam bidang ekonomi atau bisnis dan hal ini semakin menjadi jurang pemisah status sosial ekonomi etnis Jawa dan Cina. Bahkan menurut Ignas Kleden (dalam Sa'dun, 1999, h.161) sudah menjadi rahasia umum bahwa sukar bagi seseorang yang berlatar belakang etnis Cina menjadi pegawai negeri, ABRI, ataupun jabatan-jabatan strategis lainnya.

Kasus demi kasus berlanjut dalam ORBA, apalagi setelah terbukti bahwa pemerintah sendiri ternyata terlibat KKN dengan para konglomerat Cina yang mengambil keuntungan individu sehingga menjadikan Indonesia semakin terpuruk dalam krisis moneter yang berkepanjangan, dari tahun 1997 sampai saat ini. Maka

genaplah kebencian pribumi kepada etnis Cina yang mereka pikir sebagai penyebab terpuruknya ekonomi bangsa ini.

Selain faktor-faktor yang berasal dari luar etnis Cina itu adapula faktor-faktor yang membuat mereka semakin jauh saja, seperti perasaan superior etnis Cina yang diakibatkan dari mendarahdagungnya ajaran Konfusianisme di mana pada masa lampau *Kon Fu Tse* banyak mengajarkan mengenai suatu tradisi untuk mengatur manusia terhadap masalah-masalah sosial agar dapat hidup berdampingan satu sama lain. Pada saat itu *Kon Fu Tse* yakin bahwa orang-orang yang mengikuti tradisinya dapat hidup lebih baik, orang yang 'liar' akan menjadi beradap setelah mengikuti ajarannya. Bangsa di luar Cina yang belum menganut ajarannya dianggap liar dan bangsa Cina yang sudah menganut ajarannya adalah bangsa yang paling beradap. Dari sinilah muncul anggapan bahwa Cina adalah bangsa yang beradap yang pada perkembangannya melahirkan sikap superior (Hariyono, 1993, h. 23).

Bila hendak diruntut ke belakang sesungguhnya banyak sekali indikator yang menyebabkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara kedua etnis itu. Untuk itulah diperlukan satu solusi terhadap permasalahan tersebut. Akhirnya muncul beberapa pendapat yang disampaikan oleh para pemikir bangsa ini untuk memberi sumbangan terciptanya kerukunan di antara kedua etnis tadi.

Menurut sejarawan Charles A. Coppel dalam "*Indonesian Chinese in Crisis*" (Jahja, 1995, h.12) di kalangan para WNI sendiri pada dasarnya ada empat pemikiran atau terapi untuk memecahkannya. Terapi pertama dari almarhum *Siauw Giok Tjhan* (BAPERKI) yang melihat penyelesaian melalui "pembentukan masyarakat sosialis Indonesia". Terapi kedua ialah pandangan almarhum *Yap*

Thiam Hien melalui “menghapus prasangka dan menegakkan hak azasi manusia”. Terapi ketiga dikemukakan Sindhunata yaitu penyelesaian melalui pembauran atau asimilasi. Pemikiran ketiga ini kemudian di tahun 1979 dipertegas lebih lanjut oleh Junus Jahja (terapi keempat) yang menganjurkan etnis Cina masuk islam untuk memperoleh penyelesaian yang tuntas karena hanya dengan demikian diterima seluruhnya oleh rakyat (Jahja, 1995, h. 12). Dari ketiga solusi yang ditawarkan tadi, ternyata yang ketigalah yang telah disahkan dan diterima oleh pemerintah Indonesia dan sesungguhnya sudah dicanangkan semenjak Orde Lama dalam Manifesto Politik RI 1 November 1945 (Jahja, 1995, h. 11), yang kemudian dalam Orde Baru semakin mendapat perhatian dan dimasukkan dalam Resolusi MPRS tahun 1966 serta GBHN (Jahja dalam Hamzah, 1998, 86-87).

Pembauran sendiri merupakan usaha kelanjutan untuk mengurangi perbedaan individu dan kelompok manusia, mempertinggi kesatuan tingkah laku, sikap dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Pembauran atau asimilasi ini ternyata menyangkut banyak dimensi kehidupan. Menurut Milton Gordon (Hariyono, 1993, h.15), seorang ahli sosiologi dari Amerika merinci konsep asimilasi menjadi tujuh macam, seperti :

1. Asimilasi kebudayaan atau akulturasi yang berkaitan dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas;
2. Asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas;

3. Asimilasi perkawinan atau amalgamasi yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran;
4. Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa kebangsaan berdasarkan mayoritas;
5. Asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka;
6. Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi;
7. Asimilasi "civic" yang berkaitan dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan.

Dari semua bentuk asimilasi yang ada, masih terasa sulit menjelaskan asimilasi yang mana yang telah berjalan dengan baik di Indonesia, namun hampir semuanya telah menyentuh lapisan masyarakat di Indonesia. Asimilasi yang paling sulit terjadi di Indonesia adalah amalgamasi atau perkawinan campur, meskipun bentuk asimilasi yang lain pun juga termasuk masih sulit dilaksanakan.

Menurut Hariyono (1993, h,17) secara teoritis puncak dari asimilasi adalah perkawinan campur. Perkawinan campur berarti adanya kesatuan jiwa raga yang di dalamnya terlebur sifat kepribadian dan perilaku sehari-hari dari dua manusia yang berlainan jenis serta etnis yang hidup berdua selamanya dalam rumah tangga yang harmonis yang dapat menyelaraskan dua kultur yang berbeda dari masing-masing etnis. Bentuk asimilasi ini memungkinkan tidak adanya rekayasa seperti bentuk-bentuk asimilasi yang lainnya.

Masalah perkawinan campur ini telah sering dibahas oleh berbagai pihak. Menurut Setiawan (1999) dalam penelitiannya yang berjudul Perbedaan Sikap terhadap Perkawinan Campur antara Etnis Jawa dan Etnis Cina diperoleh hasil bahwa etnis Jawa ternyata lebih bersikap positif terhadap perkawinan campur

dibanding dengan etnis Cina. Dari situ menimbulkan satu pertanyaan baru yang perlu dipecahkan mengapa etnis Cina masih sulit menerima perkawinan campur ini.

Pada kenyataan sehari-hari banyak sekali kita jumpai sepasang calon mempelai yang beretnis Jawa dan Cina yang tidak direstui oleh orang tua masing-masing pihak. Perkawinan campur antara etnis Jawa dan Cina memang sulit sekali terjadi terutama pada masyarakat Cina yang masih sangat memegang tradisi Konfusianisme yang memiliki anggapan bahwa “abu” orang Cina atau peradaban orang Cina lebih tinggi dari orang Jawa. Bahkan sampai mereka menikah dan punya anak pun, pihak orang tua tidak mau mengakuinya, mereka merasa malu punya menantu Jawa dan berarti cucu mereka pun tidak bisa disebut sebagai orang Cina lagi, kecuali mereka yang masih memiliki marga di mana pihak laki-laki yang beretnis Cina masih meneruskan marga keluarga. Tak jarang pula mereka dijauhi keluarga dan teman. Oleh sebab itu pulalah ada perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan pada kalangan orang-orang Cina.

Orang Cina lebih mengorientasikan hidup mereka pada materi atau dikatakan materialistis. Sementara stereotif orang Cina terhadap orang Jawa selama ini menyebutkan bahwa orang Jawa itu malas, kurang tangguh, tidak ulet, dsb. sehingga diyakini mereka yang menikah dengan orang beretnis Jawa hidupnya akan sengsara, tidak makmur, terutama bila pihak laki-laki yang beretnis Jawa karena selama ini kita menganut paham *patrilineal*, di mana ayah sebagai pemimpin sekaligus yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga.

Perkawinan dalam orang Cina melibatkan keluarga besar yang pengaturannya dilakukan oleh orang tua (Hariyono, 1994, h. 51). Faktor pengaruh orang tua ini sangat penting dalam pengambilan keputusan calon pasangan, namun

demikian cukup sulit untuk ditelusuri lebih lanjut hubungannya dengan sikap terhadap perkawinan campur karena mau tidak mau harus kita akui bahwa kelompok generasi tua dari etnis Cina rata-rata tidak menyetujui perkawinan campur ini. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut sebab-sebab lainnya yang memungkinkan ditemukannya solusi ataupun mediator yang mampu mendukung perkawinan campur.

Menurut Hidajat (1977, h.114) faktor penghambat atau jurang pemisah terjadinya perkawinan campur ini selain faktor kepercayaan yang sudah diuraikan di atas, juga faktor sosial ekonomi. Pada masyarakat kalangan bawah umumnya perkawinan campur ini lebih sering terjadi karena diasumsikan dengan rendahnya kondisi sosial ekonomi seseorang, makin luntur pula sikap etnosentrisme dan familiismenya. Dengan perbaikan hubungan di antara kedua etnis dan tambah sempurnanya pendidikan, dapat dilihat bahwa perkawinan campur di kalangan masyarakat Indonesia akan makin bertambah (Gautama, 1996, h.5).

Lebih lanjut menurut Soebroto (dikutip Sukoco 1998, h.22) faktor yang mendukung pembauran termasuk di dalamnya perkawinan campur adalah tingkat pendidikan dan kontak antar kelompok. Upaya untuk mengubah sikap yang kurang positif tersebut harus diawali dari pendidikan yang diterima etnis Cina baik itu di bangku sekolah maupun di dalam pergaulan sehari-hari dan pendidikan informal dari orang tua. Tujuan pendidikan tersebut meliputi tiga sub tujuan , yaitu tujuan kognitif meliputi proses-proses intelektual seperti mengingat, mengerti dan memecahkan masalah. Tujuan afektif meliputi perasaan dan sikap menuju tujuan yang tepat dalam melaksanakan suatu tugas (Soeitoe, 1982, h.49).

Dengan masing-masing tahap pendidikan yang dilaluinya, individu akan mengalami proses ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan setiap tingkat pendidikan, sehingga seharusnya individu yang telah mencapai tahap tertinggi akan mampu bersikap lebih baik melalui pertimbangan-pertimbangan yang dimilikinya. Namun terkadang dalam realitanya terjadi pula hal yang sebaliknya.

Selain tingkat pendidikan, kontak antar kelompok juga sangat penting bagi terciptanya satu hubungan yang baik yang dapat melahirkan persepsi yang positif sehingga sikap antara kedua etnis menjadi lebih baik. Kontak antar kelompok mungkin terwujud bila adanya jarak yang berdekatan satu sama lain sehingga tempat tinggal menjadi faktor yang utama dalam awal interaksi antara keduanya. Menurut Koentjaraningrat (1985, h.146) lingkungan tempat tinggal merupakan lingkungan tempat seseorang hidup, berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, sebagai kesatuan hidup masyarakat yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kesamaan identitas akan muncul dengan sendirinya seiring proses sosialisasi yang menempuh jangka waktu tertentu dalam masyarakat. Tempat tinggal akan dijadikan variabel yang diduga mempengaruhi setiap sikap yang muncul terhadap perkawinan campur yang kemudian dibedakan menjadi dua yaitu daerah tempat tinggal di perkampungan dan di pecinan atau perkampungan yang sebagian besar penduduknya beretnis Cina.

Untuk mengetahui serta memahami lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya perbedaan terhadap perkawinan campur sebagai akibat dari berbedanya tempat tinggal dan tingkat pendidikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap etnis Cina dengan judul “ Sikap Etnis Cina Terhadap

Perkawinan Campur Antara Etnis Jawa dan Cina Ditinjau dari Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan “.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini nantinya adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap terhadap perkawinan campur ditinjau dari tempat tinggal
2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sikap terhadap perkawinan campur dengan tingkat pendidikan

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang sekiranya dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara praktis dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi perbedaan sikap etnis Cina terhadap perkawinan campur antara etnis Jawa dan etnis Cina ditinjau dari tempat tinggal serta mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan dengan sikap etnis Cina terhadap perkawinan campur antara etnis Jawa dan etnis Cina sehingga nantinya dapat dibuat suatu kebijakan di dalam masyarakat untuk mewujudkan berhasilnya pembauran terutama melalui perkawinan campur. Selain itu juga dapat dijadikan informasi bagi instansi-instansi yang terkait dengan masalah ini untuk memberikan pendampingan serta pengarahan kepada masyarakat untuk mendukung proses pembauran ini. Dan bagi semua pihak yang mungkin mengetahui penelitian ini

terutama mereka yang beretnis Cina mampu mengintrospeksi diri apakah selama ini sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik demi terwujudnya kcharmonisan bangsa kita tercinta ini.

2. Secara teoritis hasil penelitian ini hendak menambah masukan bagi pengetahuan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan psikologi sosial dan etnopsikologi, khususnya yang berhubungan dengan proses pembauran melalui perkawinan campur.

